

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BUKIT
SIGUNTANG OLEH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Oleh :

Nama : Bayu Lesmana

Nim : 20.11.114

Program Studi : Administrasi Negara

ABSTRACT

Bayu Lesmana, 2024 thesis title: Implementation of Policy in the Preservation of Cultural Heritage of Bukit Siguntang by the Department of Culture and Tourism of South Sumatra Province, Department of State Administration at the Satya Negara Palembang College of Administrative Sciences (STIA), Main Advisor (I) Rahmawati, SH., M.Si and Assistant Advisor (II) Saiton, Sos., M.Si

Environmental and building maintenance in Bukit Siguntang still looks lacking in terms of cleanliness management and buildings that look worn out and shabby. The lack of readiness of the implementers in preparing all technical maintenance needs for the preservation of Bukit Siguntang which supports the implementation of the maintenance program. Suboptimal provision of physical facilities that support the maintenance, insufficient resources to carry out cleaning activities, the absence of a caretaker to supervise the implementation of the maintenance program and deviations in the implementation of the main tasks that sometimes occur among staff. The purpose of the study was to describe how the implementation of the policy in the Preservation of Cultural Heritage of Bukit Siguntang by the Department of Culture and Tourism of South Sumatra Province.

The research method uses a qualitative approach with a descriptive method. The types of data used are primary data and secondary data with collection techniques through observation, interviews and documentation. This study uses the theory of Public Policy Implementation by George Edward III which has four factors that can influence policy implementation, including communication, resources, disposition and bureaucratic structure.

The results of the study indicate that the implementation of policies in the preservation of the Bukit Siguntang cultural heritage by the Department of Culture and Tourism has not been running well in preserving the Bukit Siguntang cultural heritage. This is due to the lack of resources to carry out regular supervision or patrols to maintain the Bukit Siguntang cultural heritage. Supervision in the Bukit Siguntang cultural heritage is very necessary so that the Bukit Siguntang cultural heritage site is maintained so that there is no damage to one of the important sites in the city of Palembang.

Keywords: Implementation, Preservation, Maintenance, Bukit Sziguntang

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berbudaya tinggi dan budaya tersebut bernilai bagi peradaban. Negara harus menghargai, melestarikan, melindungi dan mengembangkan kebudayaan nasional. Seperti yang dikemukakan dalam UUD RI Tahun 1945 pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Berdasarkan Hal ini menempatkan kebudayaan nasional Indonesia sebagai aspek yang dikedepankan. Selain itu terdapat faktor pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan berdasarkan ini, maka dapat dirumuskan bahwa

pemerintah Indonesia berkewajiban melaksanakan kebijakan yang berorientasi pada tingkat kemajuan budaya secara utuh untuk kemakmuran rakyat.

Salah satu bentuk kebudayaan yang mencerminkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yaitu Situs Cagar Budaya. Disebutkan dalam Pasal 1 ayat 5 UUD RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, bahwa Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti pada masa lalu. Dapat dilihat dari UUD RI Nomor 11 tahun 2010 menimbang huruf a bahwa cagar budaya memiliki arti penting dimana cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan

pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Segala bentuk situs cagar budaya baik yang di darat maupun di air perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan yang penentuannya ditetapkan melalui proses penetapan.

Pelestarian benda cagar budaya merupakan hal yang penting berdasarkan sifat-sifatnya yang dimiliki oleh benda cagar budaya dan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa benda Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi. Tujuan pelestarian merupakan kepentingan penggalian nilai-nilai budaya dan proses-proses yang pernah terjadi pada masa lalu dan perkembangannya hingga kini serta pelestarian kawasan cagar budaya juga harus diperhatikan karena benda cagar budaya adalah nilai dari suatu peristiwa sejarah yang yang pernah terjadi pada masa lalu.

Apabila melihat dari lingkup kebijakan publik, cakupannya sangat luas yang meliputi berbagai sektor, seperti pada bidang pertanian, kesehatan, transportasi, pendidikan, pertahanan termasuk pada bidang kebudayaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia adalah negara multikultural yang memiliki ciri khasnya sendiri, salah satunya adalah kebudayaannya. Rumah adat, upacara adat, musik, tarian, pertunjukan seni dan bangunan-bangunan peninggalan sejarah merupakan bagian dari kekayaan kebudayaan yang dimiliki Indonesia sekaligus sebagai identitas bangsa. Oleh karena itu, negara mempunyai tanggung jawab untuk memelihara dan memajukan kebudayaan di tengah kemajuan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan dan berkembangnya budaya asing di era globalisasi. Upaya memajukan tersebut tertuang dalam menimbang huruf a pada UUD NRI No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan yang berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan”. Selain itu, dibuatnya amanat Pasal 32 ayat (1) tersebut guna

meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia.

Pengelolaan pelestarian cagar budaya adalah wajib hukumnya bagi bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman lingkungan serta keanekaragaman budaya dalam sistem pemerintahan negara kesatuan agar tiap-tiap daerah dapat mengenali dan bangga atas budaya yang mereka miliki. Keanekaragaman budaya Indonesia inilah salah satu yang menjadi keajaiban dunia yang perlu dilestarikan dan dipertahankan karena merupakan aset yang tak ternilai harganya baik untuk bahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan maupun menjadi daya tarik bagi bangsa-bangsa lain untuk mengunjungi khasanah budaya dan alam Indonesia yang dampaknya dapat memberikan manfaat kesejahteraan masyarakat.

Palembang sebagai kota yang menduduki status kota tertua di Indonesia ini memiliki beberapa cagar budaya yang salah satunya berupa peninggalan dan bangunan bersejarah. Terdapat banyak kawasan bersejarah di Kota Palembang dimana pada setiap kawasan tersebut memiliki sejarah dengan corak ciri khas yang sangat kuat baik dalam bentuk fisik (area, bangunan) dan non fisik (budaya, sosial, dan ekonomi) (Ary Priyanto, 2020). Di Kota Palembang ini terdapat cagar budaya yang dikenal memiliki peran penting sebagai tempat peribadatan dan peziarahan bagi pemeluk agama Buddha pada masa Sriwijaya dahulu serta pada masa Islam dahulu dianggap bahwa menjadi tempat asal-usul raja-raja Melayu di Nusantara.

Situs cagar budaya tersebut dikenal dengan Bukit Siguntang. Bukit Siguntang adalah Salah satu tujuan wisata budaya yang menyuguhkan beragam peninggalan koleksi benda purba serta menjadi tempat tujuan ziarah bagi warga setempat maupun warga yang berasal dari luar negeri dan menjadi titik bukit tertinggi yang ada di Palembang.

Berdasarkan hasil observasi, ditemukan permasalahan bahwa bangunan dan lingkungan di sekitar Cagar Budaya Bukit Siguntang masih belum terawat sepenuhnya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai salah satu situs tua yang menjadi saksi sejarah di Kota Palembang, pemeliharaan terhadap situs Bukit Siguntang harus dirawat supaya menghindari potensi ancaman akan kerusakan dan gangguan baik yang dikarenakan oleh faktor usia situs, maupun perusakan yang disebabkan oleh manusia. Tidak sedikit kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia diantaranya membuang sampah tidak pada tempat meskipun sudah disediakan. Dan juga

ada beberapa oknum yang melakukan pencoretan terhadap bangunan disekitar situs atau biasanya disebut dengan tindakan vandalisme.

Melihat kurang terawatnya Situs Bukit Siguntang, dimana keadaan dari sarana yang banyak mengalami kerusakan dan penghancuran objek secara sengaja akibat kurang optimal dalam mengelola pemeliharaan bangunan dan lingkungan oleh pemerintah setempat serta pemeliharaan kebersihan lingkungan yang tidak dilakukan sepenuhnya, memperkuat bukti bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan kurang menjaga komitmen untuk melakukan pelestarian Cagar Budaya Bukit Siguntang di Kota Palembang.

Selain belum terpenuhinya perawatan pemeliharaan lingkungan dan bangunan, permasalahan yang harus dihadapi dalam melakukan program Pemeliharaan Lingkungan dan Bangunan Bukit Siguntang adalah sikap dari para pelaksana melakukan kegiatan program, dengan kata lain mengabaikan peraturan yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan. Hal ini dibuktikan dengan sikap para pelaksana terkhusus pegawai harian lepas di Bukit Siguntang kurang disiplin terkait waktu dalam menjalankan aktivitas merawat kebersihan di lingkungan Bukit Siguntang. Masih terdapat pegawai harian lepas yang menjalankan tugasnya dengan mengabaikan jam kerja yang telah ditentukan, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan di lapangan dan petugas yang tidak memahami tugasnya secara penuh dapat mengurangi kualitas kerja dari pelaksana kebijakan yang mengakibatkan kebersihan dari lingkungan Bukit siguntang tidak sepenuhnya terjaga. Hal ini sangat memprihatinkan karena pemeliharaan terhadap cagar budaya merupakan bentuk bagaimana kita menghargai sejarah, kebudayaan lokal juga dapat membangkitkan rasa nasionalisme dalam hal saling menjaga dan saling menghargai.

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang diatas, maka penulis tertarik meneliti tentang “**Implementasi Kebijakan Dalam Pelestarian Cagar Budaya Bukit Siguntang Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan**”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Dalam Pelestarian Cagar Budaya Bukit Siguntang oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah adapun tujuan dari penulisan ilmiah ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Implementasi Kebijakan Dalam Pelestarian Cagar Budaya Bukit Siguntang oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.

LANDASAN TEORI

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi dalam KBBI adalah pelaksanaan, penerapan. Dari segi bahasa, Hill and Hupe sebagaimana yang dikutip dalam (Handoyo, 2012: 94) implementasi berkaitan dengan kebijakan spesifik sebagai respon khusus atau tertentu terhadap masalah-masalah spesifik dalam masyarakat. Implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi, suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia saja.

Dari berbagai pendapat di atas, peneliti dapat menarik benang merahnya bahwa implementasi merupakan salah satu bagian dari rangkaian pelaksanaan kebijakan dimana memiliki kedudukan yang penting dalam kebijakan publik agar masalah yang telah di analisis dapat diwujudkan di dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik pada sistem politik diimplementasikan oleh para birokrat, badan-badan pemerintah ataupun agen-agen yang berada ditingkat bawah. Namun, kebijakan publik yang telah diputuskan untuk di implementasikan tidak secara utuh menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya di lapangan. Kebijakan yang telah disahkan tersebut kadang pula memperoleh penolakan dari berbagai pihak yang terkait, akan memungkinkan terjadinya perbedaan antara tujuan yang seharusnya dicapai dengan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Gejala ini dapat disebut dengan *implementation gap*.

Selain itu, terdapat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan yang disampaikan oleh (Abidin, 2004:191), yaitu:

1. Faktor utama internal, yang terdiri dari kebijakan yang akan dilaksanakan dan faktor-faktor pendukung;
2. Faktor utama eksternal adalah kondisi lingkungan (environment) dan pihak-pihak terkait (stakeholders).

Adapun Hasel dalam (Abdoellah dan Rusfiana, 2016: 60) menegaskan yang menentukan kualitas kebijakan sehingga layak untuk dilaksanakan jika mengandung beberapa elemen, yakni:

1. Tujuan yang ingin dicapai atau alasan-alasan yang dipakai untuk mengadakan kebijakan itu; tujuan atau alasan baik jika tujuan alasan itu:
 - a. Rasional, dapat diterima akal sehat, sesuai dengan faktor-faktor pendukung yang tersedia.
 - b. Diinginkan (*desirable*), tujuan dari kebijakan menyangkut kepentingan umum, sehingga mendapat dukungan dari berbagai pihak.
2. Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu realitas dan valid.
3. Informasi yang digunakan cukup lengkap dan akurat, kebijakan tidak tepat jika didasarkan pada informasi yang tidak benar sudah *out of date*.

Ketepatan strategi pelaksanaan dan kualitas kebijakan dalam mencapai tujuan adalah prinsip dari implementasi kebijakan dimana dalam mengimplemen-tasikannya yaitu dengan adanya keluaran program program dan Peraturan Daerah atau undang-undang. Apabila kedua prinsip tersebut sanggup untuk dilaksanakan, maka hal ini akan menimbulkan manfaat serta memperoleh dukungan dari publik/sasaran kebijakan.

Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Penggunaan teori teori dalam implementasi kebijakan diperlukan untuk menganalisis pada masalah kebijakan yang akan dikaji. Permasalahan kebijakan yang kompleks membutuhkan teori/model yang mampu menjelaskan sebab-akibat antar variabel atau faktor yang dijadikan fokus dalam penelitian. Berikut merupakan beberapa teori implementasi kebijakan publik yang dijabarkan oleh para ahli implementasi kebijakan publik:

1. Model George C. Edwards III

Dalam pandangan George C. Edwards III pada buku (Tangkilisan, 2003:12), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

1. komunikasi,
2. sumberdaya,
3. disposisi,
4. struktur birokrasi.

Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi. Agar implementasi menjadi efektif, maka mereka yang tanggungjawabnya adalah untuk mengimplementasikan sebuah keputusan mesti tahu apa yang seharusnya mereka kerjakan. Komando untuk mengimple-mentasikan kebijakan mesti ditransmisikan kepada personalitas yang tepat, dan kebijakan

ini mesti jelas, akurat, dan konsisten. Jika para pembuat keputusan kebijakan ini berkehendak untuk melihat yang diimplementasikan tidak jelas dan bagaimana rinciannya, maka kemungkinan akan timbul kesalahpahaman diantara para pembuat kebijakan dan implelementornya.

2. Sumberdaya. Sumberdaya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan; informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk mengimple-mentasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi; kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan; dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah, dan persediaan) di dalamnya harus memberikan pelayanan.
3. Disposisi. Disposisi adalah sikap yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Jika implementasi adalah untuk melanjutkan secara efektif, buka saja mesti para implementor tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukan hal ini, melainkan mereka juga mesti berkehendak untuk melakukan suatu kebijakan.
4. Struktur Birokrasi. Dua karakteristik utama dari birokrasi ini adalah prosedur pengoperasian standar (*standart operating procedure/SOP*) dan fragmetasi. prosedur pengoperasian standar (SOP) adalah rutin yang memungkinkan para pejabat publik untuk membuat berbagai keputusan setiap hari. Alasan SOP banyak digunakan dan efek SOP dalam implementasi kebijakan diuji dalam bagian ini.

2. Implementasi menurut Grindle

Grindle dalam (Sahya, 2014: 254) megatakan bahwa dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan bergantung pada *content* (isi) dan *context*-nya, serta tingkat keberhasilannya bergantung pada kondisi tiga komponen variabel sumber daya implementasi yang diperlukan. Isi kebijakan yang dapat memengaruhi implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut.

1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program.
Apabila kebijakan tersebut tidak menimbulkan kerugian di salah saru pihak maka implemen-tasinya akan lebih mudah karena tidak menimbulkan perlawanan bagi yang kepentingannya dirugikan.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.

Kebijakan yang memberikan manfaat kolektif atau pada banyak orang akan mudah diimplementasikan karena mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran atau masyarakat.

3. Jangkauan perubahan yang diinginkan.
Semakin luas dan besar perubahan yang diinginkan melalui kebijakan tersebut, akan semakin sulit pula dilaksanakan.
4. Kedudukan pengambil keputusan
Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam kebijakan (baik secara geografis maupun organisatoris), akan semakin sulit pula implementasinya. Kasus demikian banyak terjadi pada kebijakan yang implementasinya melibatkan banyak instansi.
5. Pelaksana program.
Ketika pelaksana program memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan, tingkat keberhasilannya juga akan tinggi.
6. Sumber daya yang disediakan.

Tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan akan mempermudah pelaksanaannya. Sumber daya ini berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana, dan lain-lain.

Tingkat keberhasilan dari implementasi akan dapat dipengaruhi oleh isi kebijakan atau program. Kebijakan yang menginginkan sebuah transformasi yang besar akan memperoleh pertentangan dari pihak yang menjadi sasaran kebijakan, maupun dari agen pelaksana yang merasa sulit menjalankan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan.

Keselarasan antara implementor dalam menjalankan kebijakan harus berjalan seiringan agar pada saat peraturan diimplementasikan tidak melenceng dari tujuan awal kebijakan tersebut.

3. Model menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn.

Ada lima variabel yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni; Standar dan sasaran kebijakan, Sumberdaya, Komunikasi, Karakteristik agen pelaksana dan, Kondisi sosial ekonomi dan politik.

1. Standard dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standard dan sasaran kebijakan kabur.
2. Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu didukung dengan sumberdaya yang baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non-manusia.

3. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
4. Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
6. Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: 1. Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan; 2. Kognisi; yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan 3. Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Untuk lebih rinci model Van Meter Van Horn ini dapat dilihat melalui gambar berikut:

4. Model menurut Mazmanian dan Sabatier

Adapun model implementasi kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier dalam (Handoyo, 2012: 106) disebut dengan model Kerangka Analisis Implementasi. Proses implementasi meliputi tiga variabel:

1. Pertama, variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan, berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan yang dikehendaki.
2. Kedua, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, digunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar, serta variabel di luar kebijakan yang memengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial ekonomi dan teknologi,

- dukungan publik, sikap konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
3. Ketiga, variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yakni pemahaman dari lembaga atau badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut atau pun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Pengertian Pelestarian

Pelestarian dan kegiatan inventarisasi peninggalan sejarah seperti cagar budaya itu satu paket, karena kegiatan inventarisasi ini sama dengan kegiatan pendokumentasian dan pelestarian sebagaimana tertuang dalam UU No 11/2010 pasal 53 (4): “bahwa pelestarian cagar budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya”.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya merupakan amanat Undang-Undang Cagar Pelestarian, yaitu upaya pengelolaan pusaka untuk memperpanjang usia benda cagar budaya, situs atau kawasan peninggalan bersejarah dengan cara perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan atau pengembangan untuk menjaga keberlanjutan, keserasian dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman untuk membangun kehidupan yang berkualitas.

Lebih rinci A.W. Widjaja (1986) mengartikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif. (Ranjabar, 2006:115).

Pengertian Cagar Budaya

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya menjelaskan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Disebutkan pula dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya kriteria dari cagar budaya adalah:

1. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih.

2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun.
3. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama. Dan/ atau kebudayaan.
4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Warisan budaya menurut Young yang dikutip oleh Ni Made Mitha Mahastuti dalam Waradi (2004) adalah keseluruhan hasil budaya dari perilaku belajar atau berpola dari kelompok masyarakat tertentu yang diwarisi dari generasi sebelumnya yang kemudian diubah, dan dilanjutkan ke generasi berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 4 Tahun 2017 tentang Pelestarian Cagar Budaya dalam pasal 4, ruang lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi:

1. Pelindungan.
 2. Pengembangan.
 3. Pemanfaatan.
 4. Pengelolaan.
 5. Pengawasan.
1. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya.
 2. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
 3. Pemanfaatan adalah pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
 4. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
 5. Pengawasan adalah upaya menghindari dan/atau menanggulangi cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.

Berdasarkan The Burra Charter (1981), Perlindungan, yaitu upaya mencegah dan menanggulangi segala gejala atau akibat kerusakan benda, situs dan kawasan cagar budaya baik dikarenakan manusia atau alam dengan cara:

1. Penyelamatan, yaitu pencegahan dan penanggulangan ancaman kerusakan atau kemusnahan perlindungan benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang timbul baik oleh alam atau manusia secara teknis.

2. Pengamanan, yaitu perlindungan dengan cara menjaga, mencegah dan menanggulangi hal-hal yang dapat merusak benda, situs, dan kawasan cagar budaya.
3. Pengembangan, yaitu upaya pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya baik dikarenakan manusia atau alam dengan cara:
 - a. Pemugaran, yaitu dengan cara mempertahankan keaslian berdasarkan data yang ada dan bila diperlukan dilakukan perkuatan struktur yang dapat dipertanggung jawabkan dari segi arkeologis, historis dan teknis.
 - b. Pemanfaatan, yaitu pemberdayaan benda, situs dan kawasan cagar budaya sebagai aset budaya untuk berbagai kepentingan yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian.
 - c. Pemanfaatan, yaitu upaya pelestarian dan pemanfaatan benda, situs dan kawasan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemugaran, pemanfaatan, dan pengendalian.

Dapat disimpulkan bahwa cagar budaya adalah suatu daerah yang dapat berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan yang ada di Indonesia yang ditetapkan dengan suatu penetapan.

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan alur penelitian yang akan sangat memperjelas dan memudahkan peneliti dalam menemukan inti persoalan yang sedang diteliti sehingga permasalahan yang diteliti akan menjadi lebih jelas. Cagar budaya sebagaimana merupakan identitas bangsa yang mengandung nilai sejarah dan menjadi kebanggaan tersendiri baik bagi negara maupun masyarakat itu sendiri serta memperkuat jati diri bangsa. Perlindungan terhadap cagar budaya perlu dilakukan agar terhindar dari kerusakan, baik tindakan perlindungan dari pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri.

Adapun Pelestarian Cagar Budaya dalam Program Pemeliharaan Lingkungan dan Bangunan Bukit Siguntang merupakan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Implementasi merupakan proses konversi *policy output* yang merumuskan kebijakan, tujuan dan sarana sehingga mengeluarkan *policy outcomes* berupa peraturan guna mencapai tujuan. Kebijakan yang telah dibuat dan dijalankan harus berkesinambungan dengan kinerja implementor

dalam mengawasi kebijakan yang telah diaplikasikan.

C. PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Dalam Pelestarian Cagar Budaya Bukit Siguntang Oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat deskriptif dimana dalam penelitian kualitatif data berupa kata-kata atau gambar yang telah terhimpun untuk dianalisis dan selanjutnya akan dideskripsikan sehingga mudah untuk dipahami.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada suatu kejadian, gejala sosial dan fenomena yang mengandung nilai-nilai berarti dan dapat dijadikan pelajaran bagi pengembangan konsep teori. Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).

Definisi Konsep

Pengertian dari konsep merupakan gagasan abstrak yang dapat digunakan menunjukkan penggolongan yang dimana pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata yang memudahkan dalam mengurai sebuah tujuan. Berdasarkan penjelasan tersebut, oleh karena itu definisi konsep yang terdapat di dalam penelitian ini ialah:

1. Implementasi adalah kebijakan yang mengacu pada tindakan individu, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, dalam kaitannya dengan hambatan yang ingin dicapai. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara terperinci berdasarkan acuan-acuan yang direncanakan dengan sungguh-sungguh.
2. Pelestarian cagar budaya adalah upaya menjaga, mempertahankan serta merawat cagar budaya sebagai warisan budaya bangsa agar terhindar dari kerusakan dan kepunahan, menjamin pemeliharaan dan mempertahankan nilai kualitas pendidikan budaya serta kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2016:38), Definisi Operasional adalah seperangkat petunjuk yang harus lengkap dan harus diamati dan mengukur

suatu variabel atau konsep untuk menguji kesempurnaan.

Sedangkan dalam melakukan penelitian dari segi Implementasi Kebijakan, penulis menetapkan model Implementasi George C. Edwards III yang

mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lain, dimana faktor-faktor tersebut meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi.

Tabel Definisi Operasional

Konsep	Indikator
Implementasi (George C. Edwards III)	1. Komunikasi 2. Sumberdaya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi
Pelestarian Cagar Budaya (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No 4 Tahun 2017 tentang Pelestarian Cagar Budaya Pasal 4)	1. Pelindungan 2. Pengembangan 3. Pemanfaatan 4. Pengelolaan 5. Pengawasan

Informan Penelitian

Teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* merupakan teknik yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Penentuan informan pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana teknik ini mempertimbangkan penentuan

narasumber yang akan dijadikan informan dan diyakini sebagai penguasa atau orang yang banyak mengetahui terkait dengan situasi sosial yang diteliti sehingga memudahkan peneliti dalam meraih informasi. Adapun informan penelitian dalam penelitian ini adalah:

Informan Penelitian		
No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Taman Wisata dan Budaya Kerajaan Sriwijaya	1 Orang
2	Kepala Seksi Bukit Siguntang	1 Orang
3	Pegawai Bukit Siguntang	3 Orang
Jumlah		5 Orang

Selanjutnya akan terdapat pengembangan informan dalam penelitian ini sesuai dengan data yang diperoleh pada saat penelitian dilaksanakan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Agar sebuah penelitian mampu memberikan manfaat dan menjadi penemuan baru, dibutuhkan teknik pengumpulan data yang menggunakan cara tertentu untuk mendapatkan data-data lapangan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Menurut Gordon E Mills dalam (Umar dan Choiri, 2019:67) observasi adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk

melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada di balik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem tersebut.

2. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2021:114). Proses menggali informasi yang dilakukan oleh *inter-viewer* terhadap *interview* merupakan suatu interaksi yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dimana kedua pihak memiliki kepentingan dan tujuan ketika melakukan wawancara.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif dokumen merupakan metode yang melengkapi dan mendukung dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Metode dokumentasi juga

memiliki peran penting dalam teknik pengumpulan data dikarenakan mampu meningkatkan kepercayaan dan memperkuat pembuktian suatu kejadian (Satori dan Komariah, 2009: 11). Mengemukakan dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.

Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah aktifitas kritis dalam proses analisis data kualitatif yang digunakan peneliti agar mampu memahami hubungan dan konsep data hasil dari wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya yang diurutkan secara sistematis dan dikembangkan serta dievaluasi. Analisis data pada penelitian ini akan menggunakan model interaktif dari Sugiyono (2013:218) yang meliputi tiga komponen analisis, yaitu reduksi, sajian data, penarikan kesimpulan.

Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang diperoleh di lapangan. Reduksi data karenanya merupakan alat analisis, sebab tindakan-tindakan tersebut tidak lain merupakan pilihan-pilihan analisis.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan/penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Membuat penyajian data juga merupakan sebuah langkah analisis data. Setelah data dibuat dalam bentuk tabel, bagan, matrik, dan grafik dilakukan tahapan dengan mendiskusikan selanjutnya memberikan penafsiran dan interpretasi.

3. Menarik kesimpulan dan verifikasi

Menarik kesimpulan dan verifikasi merupakan pemahaman atas informasi kemudian mencari makna dari catatan mengenai keteraturan Untuk itu, dalam penelitian kualitatif kesimpulan-kesimpulan yang diambil dengan longgar, tetap terbuka, skeptis sifatnya meskipun kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, dan kemudian meningkat menjadi lebih rinci serta membangun wawasan umum.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Dalam

Pelestarian Cagar Budaya Bukit Siguntang Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.

Data yang diambil dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi pustaka. Dalam pengumpulan data peneliti memilih informan yang dirasa berkompeten dan mampu memberikan informasi serta pemahaman kepada penulis.

Implementasi Kebijakan dalam Pelestarian Cagar Budaya Bukit Siguntang Oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.

Implementasi adalah salah satu bagian dari rangkaian pelaksanaan kebijakan dimana memiliki kedudukan yang penting dalam kebijakan publik agar masalah yang telah di analisis dapat diwujudkan di dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik pada sistem politik diimplementasikan oleh para birokrat, badan-badan pemerintah ataupun agen-agen yang berada ditingkat bawah.

Data penelitian telah disesuaikan dengan teori yang digunakan oleh peneliti. Analisis dalam penelitian ini menggunakan Teori George C. Edwards III, yang mengidentifikasi empat dimensi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Agar implementasi menjadi efektif, maka mereka yang tanggung jawabnya adalah untuk mengimplementasikan sebuah keputusan mesti tahu apa yang seharusnya mereka kerjakan. Komando untuk mengimplementasikan kebijakan mesti ditransmisikan kepada personalitas yang tepat, dan kebijakan ini mesti jelas, akurat, dan konsisten. Jika para pembuat keputusan kebijakan ini berkehendak untuk melihat yang diimplementasikan tidak jelas dan bagaimana rinciannya, maka kemungkinan akan timbul kesalahpahaman diantara para pembuat kebijakan dan implemementornya.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa penyaluran informasi teknis pelaksanaan program kepada staf dan pegawai harian lepas di cagar budaya Bukit Siguntang dilakukan melalui berbagai metode. Metode tersebut meliputi briefing harian, pertemuan rutin, grup WhatsApp, email, dokumen panduan, modul pelatihan, workshop mingguan, dan pelatihan langsung di lapangan. Kombinasi antara pertemuan langsung dan komunikasi digital memastikan

bahwa semua staf dan pegawai harian lepas mendapatkan informasi yang diperlukan dengan cara yang efektif dan efisien.

2. Sumberdaya

Tabel Data Pegawai di Bukit Siguntang

Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)
Aparatur Sipil Negara (ASN)	4
Pegawai Harian Lepas(PHL)	5
Satpam	3

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

Sumberdaya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan; informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi; kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan; dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah, dan persediaan) di dalamnya harus memberikan pelayanan.

Adapun sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh PHL dalam melakukan perawatan di Bukit Siguntang terdapat sapu lidi, mesin senso, racun rumput, mesin pemotong rumput dan tempat sampah. Fasilitas fisik lainnya seperti alat untuk membersihkan lantai serta sapu lantai tidak tersedia untuk pemeliharaan di Bukit Siguntang. Berikut adalah tabel daftar jumlah fasilitas yang tersedia di Bukit Siguntang:

Tabel Daftar Fasilitas di Bukit Siguntang

Sarana	Jumlah
Sapu Lidi	8
Mesin Senso	1
Racun Rumput	2
Mesin Rumput	3
Tempat Sampah	5

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

Adapun honor yang diberikan kepada Pegawai Harian Lepas (PHL) yang diberikan perhari yang berkisar antara Rp 50.000 hingga Rp 100.000 per harinya tergantung dari apa yang dikerjakan oleh pegawai harian lepas. Untuk anggaran yang lainnya dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum transparan.

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai harian lepas yang bertugas di Bukit Siguntang berkisar antara 2 hingga 5 orang setiap hari. Fasilitas yang disediakan untuk mereka mencakup peralatan kebersihan standar, seperti sapu, alat pemotong rumput, gerobak sampah, serta perlengkapan keselamatan dan tempat istirahat yang memadai. Namun belum

maksimal dalam menjaga situs cagar budaya Bukit Siguntang.

3. Diposisi

Hasil wawancara dengan Kepala UPTD mengungkapkan bahwa UPTD telah berupaya melaksanakan program pemeliharaan lingkungan dan bangunan di Bukit Siguntang, namun tidak semua upaya tersebut berhasil atau berjalan dengan lancar. Berikut adalah wawancara dengan Kepala UPTD mengenai sikap PHL dalam melakukan tugas dan fungsinya di Bukit Siguntang:

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap para pegawai harian lepas sebagai implementor di Cagar Budaya Bukit Siguntang umumnya sangat positif. Mereka menunjukkan antusiasme, dedikasi, disiplin, proaktif, dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas mereka. Mereka juga kooperatif, peduli terhadap kebersihan dan kerapian situs, serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentang sejarah dan pentingnya pelestarian cagar budaya ini. Dukungan dan bimbingan dari koordinator dan pengawas lapangan sangat membantu dalam memastikan bahwa tugas dan fungsi mereka dilakukan dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Dua karakteristik utama dari birokrasi ini adalah prosedur pengoperasian standar (*standart operating procedure/SOP*) dan fragmentasi. standar operasional prosedur (SOP) adalah rutin yang memungkinkan para pejabat publik untuk membuat berbagai keputusan setiap hari. Alasan SOP banyak digunakan dan efeknya dalam implementasi kebijakan diuji dalam bagian ini. fragmentasi merupakan pembagian tanggungjawab untuk sebuah bidang kebijakan diantara unit-unit organisasional.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas dan fungsi pegawai harian lepas di cagar budaya Bukit Siguntang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Tugas-tugas diberikan berdasarkan kebutuhan harian, keahlian, dan pengalaman individu. Metode yang digunakan meliputi briefing pagi, daftar tugas harian, dan jadwal rotasi untuk memastikan semua pekerja mendapatkan pengalaman yang beragam. Tugas yang diberikan meliputi pembersihan, perawatan taman, pemeliharaan struktur, kegiatan edukasi, dokumentasi, dan penelitian. Pengawasan dan arahan yang jelas memastikan bahwa semua pegawai memahami peran dan tanggung jawab mereka.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 4 Tahun 2017 tentang Pelestarian Cagar Budaya Pasal 4

Pelestarian adalah upaya pengelolaan pusaka melalui kegiatan penelitian, perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan, dan atau pengembangan secara selektif untuk menjaga kesinambungan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih berkualitas. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

1. Pelindungan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki berbagai strategi dalam melindungi cagar budaya Bukit Siguntang. Mulai dari penegakan peraturan, kegiatan konservasi, dan restorasi, hingga edukasi masyarakat dan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti arkeolog dan komunitas lokal. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa situs bersejarah ini tetap terjaga dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan berbagai langkah untuk melindungi Bukit Siguntang.

2. Pengembangan

Dari hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggunakan pendekatan yang komprehensif dalam mengembangkan Cagar Budaya Bukit Siguntang. Pendekatan ini mencakup penelitian dan restorasi, fasilitas penunjang, keterlibatan masyarakat, edukasi, dan promosi wisata. Semua langkah ini bertujuan untuk menjaga kelestarian situs sekaligus meningkatkan nilai pariwisata dan budaya di Bukit Siguntang. Dalam upaya pengembangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan berbagai program restorasi dan konservasi untuk memperbaiki struktur dan artefak yang ada. Selain itu, mereka juga mengadakan penelitian arkeologi untuk menggali lebih banyak informasi sejarah dari situs tersebut.

3. Pemanfaatan

Dari hasil wawancara, terlihat bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memanfaatkan Bukit Siguntang dengan berbagai cara untuk memastikan pelestariannya sekaligus mempromosikannya

sebagai destinasi wisata edukatif. Kegiatan yang dilakukan meliputi tur sejarah, seminar, lokakarya, festival tahunan, penerbitan materi informatif, dan pelatihan masyarakat. Upaya konservasi dan pemeliharaan rutin juga dilakukan untuk menjaga kondisi situs..

4. Pengelolaan

Dari hasil wawancara terlihat bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengelola cagar budaya Bukit Siguntang dengan berbagai pendekatan, mulai dari pemugaran, edukasi, pelestarian lingkungan, hingga melibatkan masyarakat dalam menjaga situs bersejarah tersebut. Pengelolaan Bukit Siguntang dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah daerah, komunitas lokal, dan para ahli cagar budaya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga membuat rencana manajemen yang detail, mencakup aspek pelestarian, pemeliharaan, dan promosi situs.

5. Pengawasan

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan berbagai langkah strategis dalam mengawasi dan melestarikan cagar budaya Bukit Siguntang, mulai dari patroli rutin, pemasangan rambu-rambu, koordinasi dengan masyarakat dan ahli, hingga penggunaan teknologi seperti CCTV. Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen dinas dalam menjaga warisan budaya tersebut.

Pembahasan

Pada sub bab ini, data yang disajikan akan dianalisis dengan mengacu pada interpretasi data sesuai dengan fokus penelitian. Seluruh data yang diperoleh selama penelitian, termasuk hasil wawancara dengan informan yang relevan, akan digunakan untuk menjawab permasalahan tentang Implementasi Kebijakan Dalam Pelestarian Cagar Budaya Bukit Siguntang oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan data tersebut, penulis akan melakukan analisis dan menguraikan hasil analisis tersebut berdasarkan wawancara yang telah dilakukan.

Implementasi Kebijakan dalam Pelestarian Cagar Budaya Bukit Siguntang Oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian, penyaluran informasi teknis di cagar budaya Bukit Siguntang dilakukan melalui berbagai metode yang saling melengkapi. Kombinasi antara briefing harian, pertemuan rutin, komunikasi digital, dokumen

panduan, modul pelatihan, workshop mingguan, dan radio komunikasi memastikan bahwa semua staf dan pegawai harian lepas mendapatkan informasi yang diperlukan dengan cara yang efektif dan efisien. Metode ini tidak hanya membantu dalam memberikan instruksi yang jelas, tetapi juga dalam memastikan bahwa pegawai selalu up-to-date dengan informasi terbaru dan dapat bekerja dengan optimal.

Dapat disimpulkan bahwa penyaluran informasi teknis pelaksanaan program kepada staf dan pegawai harian lepas di cagar budaya Bukit Siguntang dilakukan melalui berbagai metode yang efektif. Metode-metode tersebut meliputi briefing harian, pertemuan rutin setiap pagi dan mingguan, penggunaan grup WhatsApp untuk update terkini, serta penyediaan dokumen panduan tertulis dan buku panduan teknis. Selain itu, dilakukan pelatihan langsung di lapangan, modul pelatihan, dan workshop mingguan untuk memperbarui informasi dan membahas masalah teknis yang muncul.

2. Sumberdaya

Berdasarkan hasil penelitian, setiap hari sekitar 2 hingga 5 pegawai harian lepas bertugas di Bukit Siguntang. Mereka dilengkapi dengan berbagai peralatan kebersihan seperti sapu, cangkul, alat pemotong rumput, kantong sampah, dan gerobak sampah. Selain itu, para pegawai juga mendapatkan seragam kerja, masker, rompi, dan sepatu boot untuk keselamatan. Fasilitas lain yang disediakan meliputi tempat istirahat yang layak, air minum, toilet, dan ruang ganti. Semua ini memastikan mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan efisien dan dalam kondisi yang aman.

3. Disposisi

Hasil wawancara secara keseluruhan, sikap para pegawai harian lepas di Cagar Budaya Bukit Siguntang sangat positif dan berkontribusi besar terhadap pelestarian situs. Antusiasme, dedikasi, disiplin, kooperatif, komitmen, dan rasa ingin tahu mereka menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Dukungan dan bimbingan yang berkelanjutan dari koordinator dan pengawas lapangan sangat penting untuk memastikan tugas dan fungsi mereka dilakukan dengan baik dan terus meningkat.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian dengan beberapa informan, pembagian tugas dan fungsi pegawai harian lepas di Cagar Budaya Bukit Siguntang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Tugas-

tugas diberikan berdasarkan kebutuhan harian, keahlian, dan pengalaman individu. Metode yang digunakan meliputi briefing pagi, daftar tugas harian, dan jadwal rotasi, yang semuanya dirancang untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan pengembangan keterampilan pegawai. Pembagian tugas yang baik dan pengawasan yang jelas sangat penting untuk memastikan bahwa semua tugas dan fungsi dijalankan dengan baik dan mendukung tujuan pelestarian situs budaya Bukit Siguntang.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 4 Tahun 2017 tentang Pelestarian Cagar Budaya Pasal 4

1. Pelindungan

Selain itu, mereka berkolaborasi dengan arkeolog untuk penelitian lanjutan tentang sejarah Bukit Siguntang. Kampanye kesadaran wisata intensif juga digelar, memberikan panduan kepada pengunjung tentang cara berperilaku di situs cagar budaya, disertai perbaikan fasilitas pendukung seperti papan informasi dan jalur pejalan kaki. Dinas ini sering mengadakan gotong royong bersama warga untuk membersihkan dan merawat Bukit Siguntang, serta menyediakan dana dan sumber daya untuk perbaikan struktur yang rusak.

2. Pengembangan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah menerapkan berbagai strategi untuk mengembangkan Bukit Siguntang sebagai cagar budaya yang unggul. Upaya ini mencakup aspek pelestarian fisik dan lingkungan, peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat, promosi pariwisata, serta kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Mereka sering mengadakan acara budaya dan festival untuk menarik wisatawan, sekaligus menyediakan fasilitas penunjang seperti pusat informasi, pemandu wisata, dan jalur pejalan kaki yang aman.

3. Pemanfaatan

Tur sejarah dan kunjungan lapangan melibatkan pemandu lokal dan kerjasama dengan sekolah-sekolah, sementara seminar dan lokakarya melibatkan ahli sejarah dan arkeologi, memberikan kesempatan untuk penelitian lebih lanjut. Promosi wisata berbasis budaya dilakukan melalui media sosial dan kerjasama dengan agen perjalanan, serta festival tahunan yang menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara. Dinas juga berkolaborasi dengan akademisi untuk penelitian arkeologis guna mengungkap lebih banyak tentang sejarah Bukit Siguntang. Selain itu, masyarakat sekitar diberikan pelatihan tentang pentingnya

menjaga dan melestarikan cagar budaya ini, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam menjaga warisan budaya.

4. Pengelolaan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bekerja sama dengan masyarakat setempat melalui pelatihan dan pemberdayaan, sehingga mereka dapat berperan serta dalam menjaga dan mempromosikan cagar budaya tersebut. Upaya ini diharapkan dapat menjaga kelestarian Bukit Siguntang sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi komunitas setempat. Mereka juga bekerja sama dengan arkeolog untuk penelitian sejarah yang lebih mendalam dan mengadakan acara edukasi serta tur sejarah yang melibatkan masyarakat dan pelajar. Selain menjaga kebersihan dan keasrian situs melalui kegiatan bersih-bersih, Dinas juga memperbaiki infrastruktur untuk kenyamanan pengunjung, seperti jalan setapak dan area parkir. Semua upaya ini menunjukkan komitmen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melibatkan komunitas lokal dan menjaga warisan budaya untuk generasi mendatang.

5. Pengawasan

Pelaporan kerusakan langsung diteruskan ke dinas terkait untuk tindakan cepat. Selain itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bekerja sama dengan para ahli arkeologi untuk melakukan penelitian berkala, melakukan pemetaan digital, dan mencatat semua artefak yang ditemukan di situs ini. Pelatihan kepada petugas lapangan tentang cara-cara menjaga dan melindungi situs juga dilakukan secara berkala. Serta masyarakat sekitar juga diajak berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi dan pelestarian Bukit Siguntang, diberi pemahaman tentang pentingnya situs ini, serta diberi nomor kontak petugas dinas untuk melaporkan hal-hal mencurigakan. Pengunjung pun merasakan keberadaan petugas yang berpatroli dan kamera CCTV yang dipasang di titik-titik strategis untuk memantau aktivitas. Namun masih saja terjadi tindakan perusakan di bangunan sekitar Cagar budaya Bukit Siguntang.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di Bab V, dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa implementasi kebijakan dalam pelestarian cagar budaya Bukit Siguntang oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum berjalan dengan baik dalam melestarikan Cagar Budaya Bukit Siguntang. Hal ini disebabkan kurangnya sumber daya manusia

untuk melakukan pengawasan atau patroli secara teratur untuk menjaga Cagar Budaya Bukit Siguntang dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum transparan dalam soal anggaran yang ada di Bukit Siguntang. Pengawasan di Cagar Budaya Bukit Siguntang sangatlah diperlukan agar situs cagar budaya Bukit Siguntang tetap terjaga agar tidak terjadi kerusakan salah satu situs penting yang ada di kota Palembang.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis memberikan saran kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menambahkan sumber daya manusia atau membuat tim khusus untuk melakukan patroli secara menyeluruh di situs Cagar Budaya Bukit Siguntang. Atau memberikan arahan terhadap penjaga pintu gerbang agar memeriksa barang yang dibawa oleh pengunjung yang bisa merusak situs dan bangunan di sekitar Cagar Budaya Bukit Siguntang.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA.
- Abdoellah, Awan Y. Yudi Rusfiana. 2016. *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA.
- Alaslan, Amtai. 2021. *Formulasi Kebijakan Publik: Studi Relokasi Pasar*. Purwokerto Selatan: CV. PENA PERSADA.
- Alwasilah, A. Chaidar, 2006. *Pokoknya Kualitatif Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta. PT. Dunia Pustaka Jaya .
- Dunn, William N. Tanpa Tahun. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*. Terjemahan oleh Samodra Wibawa dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Ranjabar, Jacobus. (2006). *Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar*. Bogor: PT. Ghalia Indonesia
- Sidiq, Umar. Moh. Miftachul Choiri. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik “Konsep, Teori dan Aplikasi”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.

Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik "Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan"*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (pers).

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan "Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik"*. Jakrta: PT Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2021. *Analisis Kebijakan Publik "Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik" (Edisi Revisi)*. Malang: Media Nusa Creativ

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

THESIS

Faridh, Ahmad Miftah. 2020. *Model Kebijakan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya Di Kawasan Kota Lama Semarang*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Setyawa, Dody. Agus Priantono NC dan Firman Firdausi. 2021. *Model George Edward III: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang*. Thesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tungadewi, Malang.

JURNAL

Bombo, Dodi Aries. 2021. *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Melestarikan Cagar Budaya (Studi Kelurahan Polowijen)*. *Journal of Public Administration and Sociology of Development*, Vol. 2 (2). 104-113.

Ismail, Hasan. 2022. *Studi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM di*

Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 06.

Kurnia, Heni. Agus Suryono dan Minto Hadi. *Implementasi Perda Kota Surabaya No. 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya di Kota Surabaya (Suatu Studi Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1 (5). 1060-1066.

Rusidia, Ujud dan Deni Ahdian. 2021. *Implementasi Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung*. *Jurnal JISI POL*, Vol. 5 (2). 11-21.

Roring, Andreas Delpiero. 2021. Michael S. Mantiri dan Marlien T. Lopian. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 29) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan*. *Journal Governance*, Vol. 1 (2). 3-5.

Ritiduan, Diky, Suci Megawati. 2021. *Implementasi Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya (Studi Pada Bangunan Bekas Penjara Koblen Menjadi Pasar Buah di Kota Surabaya)*. *Publika*. Vol. 9.

Subekti, Mening, Mulih Faozanuddin dan Ali Rokhman. 2017. *Pengaruh Kkomunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektivitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tambak*. *The Indonesian Journal Of Public Administration*. Vol. 3.

Volare Amanda Wirastari dkk, 2012. *Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus Kawasan Cagar Budaya Bubutan Surabaya)* Institut Teknologi Sepuluh Nofember(ITS), Vol.01